

PEMERINTAH KABUPATEN BONE



RENCANA KERJA TAHUN 2019

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE**





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 74 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, maka diperlukan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemertintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode waktu 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan maksud :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019, Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan;
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 1 Agustus 2018

Pj. BUPATI BONE,



ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 74

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran BPKAD serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di BPKAD.

Renja BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun pertama dari Renstra BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dan tahun pertama Renja BPKAD yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2013-2018 dan pelaksanaan serta rencana estimasi program dan kegiatan tahun 2020 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program. Pada tahun 2019 BPKAD merencanakan 9 (sembilan) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 59 (lima puluh sembilan) kegiatan.

Disusunnya Renja BPKAD Tahun 2019 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Bone dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renja BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2019 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Watampone, 1 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE


Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19650915 198603 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan	41
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
 BAB V PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang keuangan daerah.

Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- OPD.

1.2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone mengacu pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018-2023 dan untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Dalam mencapai maksud diatas, tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- b. Mengidentifikasi kinerja pelayanan BPKAD.

- c. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis BPKAD 1 (satu) tahun mendatang.
- d. Menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja dan target pembangunan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.
- e. Menetapkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang disertai pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun mendatang.
- f. Menetapkan rencana kerja dan pendanaan BPKAD selama 1 (satu) tahun mendatang.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengemukakan capaian-capaian pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra periode sebelumnya

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil penelaah kebijakan nasional dan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikatornya, serta perumusan program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan hasil perumusan program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa SKPD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kunci BPKAD Kabupaten Bone yang merupakan representasi dari Misi ke 1 (satu) “*Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN*” dengan program strategis pemerintah daerah yaitu: *Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan*

Keuangan Daerah, yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013–2018 yaitu:

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun s/d Tahun 2018

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.20'	<i>Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>									
1.20.05	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>									
120.120 05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	30	17	6	6	100.00	6	29	96.67
120.120 05.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.01.19	Kegiatan Pengelolaan Gaji	Tersedianya Penyelesaian pengelolaan Gaji PNS	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.01.23	Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.01.24	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (ATK, Materai, Cetak/Penggandaan, Makanan dan Minuman	5	2	1	1	100.00	1	4	80.00
120.120 05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur	38	18	8	8	100.00	8	34	89.47
120.120 05.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/Operasional: Motor Dinas	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target progra m dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
120.120 05.02.06	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	3	2	1	1	100.00	1	4	133.33
120.120 05.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya Pengadaan AC, Soundsystem, dan Gorden	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianyaPengada an peralatan gedung kantor: Tabung pemadam, Komputer/PC, Notebook/ Laptop, Printer, Scanner, Kulkas Mini,	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
120.120 05.02.10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan: Sofa Ruang Tunggu	5	1	1	1	100.00	1	3	60.00
120.120 05.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan pekarangan dan gedung kantor	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.02.28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan dan jaringan gedung kantor	5	2	1	1	100.00	1	4	80.00
120.120 05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12	6	3	3	100.00	3	12	100.00
120.120 05.05.03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis PNS	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.05.06	Kegiatan Sosialisasi Pajak	Tersedianya Kegiatan Sosialisai Pajak	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.05.16	Kegiatan Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksanya studi banding aparat pengelolaan keuangan daerah	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12	6	3	3	100.00	3	12	100.00
120.120 05.06.01	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.06.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Penyusunan laporan realisasi semester I APBD dan prognosis 6 bulan	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.06.05	Kegiatan Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi	Tersedianya database kemiskinan yan partisipatif yang memuat informasi tentang identifikasi kebutuhan	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
		mendasar bagi RTS si wilayah program								
120.120 05.06.06	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Tersedianya Pengesahan SPJ	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.06.07	Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.07.03	Kegiatan Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Tersedianya Penerbitan SP2D	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
116.120 05.15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi Dan Kerjasama Investasi	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
116.120 05.15.10	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	tersedianya Pameran Pembangunan Kabupaten Bone	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
109.120 05.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
109.120 05.16.01	Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya HGB Ex. Pasar Sentral, Pasar Palakka dan Pengelolaan Penyelesaian Piutang	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
109.120 05.16	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
109.120 05.16.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya dan Mengembangnya Pengelolaan Keuangan	113	53	29	29	100.00	29	111	98.23
120.120 05.17.02	Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersedianya Buku standar Harga Satuan Barang	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.06	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersedianya Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2017 dan Perda tentang APBD Tahun 2017	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.07	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 Partial APBD	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
	APBD	Tahun 2017								
120.120 05.17.08	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun 2017 dan Perda tentang APBD Tahun 2017	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.09	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2017 dan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Tahun 2017	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.10	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan perda tentang Pertanggungjawabana APBD	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.11	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	Tersedianyan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Tahun 2016	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.13	Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	4	3	1	1	100.00	1	5	125.00
120.120 05.17.14	Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksanya Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.17.16	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	Terlaksananya Penelolaan manajemen aset barang daerah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.20	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peksanaan Anggaran SKPD	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.28	Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	Tersedsianya data aset barang daerah	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.32	Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD	Tersedianya Rancangan PPAS APBD/APBD-P dan Rancangan Nota Keuangan APBD/APBD-P	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.34	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Meningkatnya efisiensi data barang milik daerah yang akuntabel melalui SIMDA	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.35	Kegiatan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Terlaksananya penghapusan BMD	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.17.38	Kegiatan Labelisasi Aset Barang Daerah	Terlaksananya labelisasi inventaris BMD	4	1					1	25.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
120.120 05.17.41	Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Tersedianya Buku daftar kebutuhab barang milik daerah	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.17.42	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan BMD	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.43	Kegiatan Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Meningkatnya administrasi laporan pajak daerah	4	2	1	1	100.00	1	4	100.00
120.120 05.17.45	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018	Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2018 dan Perda tentang APBD Tahun 2018	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.46	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2018	Tersusunnya Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 dan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun 2018	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.47	Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya penilaian barang milik daerah	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.49	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.17.50	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sistem penyusunan APBD-APBDP dan informasi anggaran	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.52	Kegiatan Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan	Tersedianya pengelolaan data arsip keuangan	3	1	1	1	100.00	1	3	100.00
120.120 05.17.64	Kegiatan Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Tersedianya SPMU yang akan diterbitkan SP2D	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.17.65	Kegiatan Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah	Tersedianya data administrasi keuangan	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.17.66	Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.17.67	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) S/D Tahun 2018	Realisasi Realisasi Target Hasil Program dan keluarah kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan Renja 2018	Perkiraan realisasi capaian target renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Reanja Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2018	Tingkat capaian realisasi target renstra
	Pelaksanaan APBD									
120.120 05.17.68	Kegiatan Pelaporan Aset	Tersedianya Laporan Aset	2	0	1	1	100.00	1	2	100.00
120.120 05.17.69	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya Perda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	1	0	1	1	100.00	1	2	200.00
120.120 05.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00
120.120 05.20.09	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan TGR	Meningkatnya penyelesaian kasus TGR	5	3	1	1	100.00	1	5	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1.Strength (kekuatan)

- Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bone dan melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone serta Raperda KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone;
- Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
- Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

2.2.2.Weaknes (kelemahan)

- Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

2. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang)

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/ dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bone serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kabupaten Bone disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi ;
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kabupaten Bone dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (tantangan),

1. Terbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.
2. Masih banyak OPD yang menyajikan Laporan Keuangan dan Aset tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			95%	96%	97%	98%	100%	100%	97%	98%	
	Jumlah per jenis rekening			285 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	285 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	294 Rekening Listrik	
				19 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	19 Rekening Air	19 Rekening Air	20 Rekening Air	20 Rekening Air	
				45 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	45 Rekening Telpon/Speede	46 Rekening	47 Rekening Telpon/Speede	47 Rekening Telpon/Speede	
	Jumlah ASN yang menerima tunjangan			108 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	107 ASN	107 ASN	109 ASN	107 ASN	
	Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			53 Media	100 Media	52 Media	100 Media	53 Media	100 Media	52 Media	100 Media	
	Jumlah PNS yang Menerima Gaji			9.617 PNS	9.372 PNS			9.617 PNS	9.372 PNS			
	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan dalam daerah			980S PPD	990 SPPD	1000 SPPD	1100 SPPD	960 SPPD	979 SPPD	1000 SPPD	1100 SPPD	
	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran			1 Paket	1 Paket	8 Paket	8 Paket	1 Paket	1 Paket	8 Paket	8 Paket	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur					95%	97%			95%	97%	
	Jumlah baju seragam					110 Set	110 Set			110 Set	110 Set	
2	Persentase peningkatan ketersediaan sarana dan prasaran aparatur			100%	100%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	
	Jumlah bangunan gedung kantor					1 Gedung	1 Gedung		-	1 Gedung	1 Gedung	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			3 Unit Motor	6 Unit Mobil	3 Unit Motor	Mobil 1 unit	3 Unit Motor	6 Unit Mobil	3 Unit Motor	Mobil 1 unit	
	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas			Almari 1 SET	-	2 Unit	1 Set	Almari 1 SET	-	2 Unit	1 Set	
	Jumlah dan jenis Perlengkapan gedung kantor			AC 4 Unit	AC 5 Unit	AC 3 Unit	3 unit	AC 4 Unit	AC 5 Unit	AC 3 Unit	3 unit	
Sound System 1 SET				Sound System 1 SET								
Gorden 1 Paket				Gorden 1 Paket								
	Jumlah dan jenis peralatan rumah dinas				-	2 Unit	1 Set		-	2 Unit	1 Set	
	Jumlah pemeliharaan rumah dinas				-	1 Paket	1 Paket		-	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah peralatan gedung kantor			Tabung Pemadam 10 Unit	Komputer/pc 4 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	Tabung Pemadam 10 Unit	Komputer/pc 4 Unit	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	Komputer/Pc 10 Unit	
Komputer/pc 1 Unit				Notebook 3 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Komputer/pc 1 Unit	Notebook 3 Unit	Mesin Ketik 1 Unit	Mesin Ketik 1 Unit		
otebook/Laptop 4 Unit				CPU 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit	Notebook/Laptop 4 Unit	CPU 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit	Mesin Absensi 1 Unit		
Printer 4 Unit				Dispenser 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 6 Unit	Printer 4 Unit	Dispenser 1 Unit	Printer 5 Unit	Printer 6 Unit		
Scanner 1 Unit				Kamera 1 Unit	UPS 3 Unit		Scanner 1 Unit	Kamera 1 Unit	UPS 3 Unit			
Kulkas Mini 4 Unit				Printer 5 Unit	Kulkas 2 Unit		Kulkas Mini 4 Unit	Printer 5 Unit	Kulkas 2 Unit			
Kamera 1 Unit					Kamera 1 Unit		Kamera 1 Unit		Kamera 1 Unit			
cctv 1 Unit					Proyektor 1 Unit		cctv 1 Unit		Proyektor 1 Unit			
Pesawat Telepon 10 Unit					GPS Pengukur Tanah 1 Unit		Pesawat Telepon 10 Unit		GPS Pengukur Tanah 1 Unit			
	Jumlah Kebutuhan Mebeleur			1 SET Sofa	1 Set Sofa Jati plus Almari	7 Unit	Almari 20 Unit	1 SET Sofa	1 Set Sofa Jati plus Almari	7 Unit	Almari 20 Unit	
	Jumlah Mobil dan Motor yang dan dipelihara			Mobil 5 Unit	Mobil 5 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	Mobil 5 Unit	Mobil 5 Unit	Mobil 7 Unit	Mobil 10 Unit	
				Motor 31 Unit	32 Motor Dinas	33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	Motor 31 Unit	32 Motor Dinas	33 Motor Dinas	35 Motor Dinas	
	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara			1 Paket	1 Paket	40 Unit	40 Unit	1 Paket	1 Paket	40 Unit	40 Unit	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1 Paket	1 Paket	4 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	3 Paket	
3	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim					1 ASN	2 ASN			1 ASN	2 ASN	
	Jumlah aparatur yang mengikuti Bintek			10 Orang	10 Orang	12 ASN	12 ASN	8 Orang	8 Orang	12 ASN	12 ASN	
	Jumlah peserta sosialisasi			75 Orang	75 Orang	75 Peserta	75 Peserta	70 Orang	70 Orang	75 Peserta	75 Peserta	
	Jumlah peserta Studi Banding			75 Orang	75 Orang			58 Orang	67 Orang			
	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur					50 ASN	50 ASN			50 ASN	50 ASN	
4	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	100%	93%	95%	100%	100%	93%	95%	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			RENJA, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKJP, SOP, ANJAB, ABK	RENJA, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKJP, SOP, RENSTRA	5 Dokumen	7 Dokumen	RENJA, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKJP, SOP, ANJAB, ABK	RENJA, RKA, DPA, LKJIP, LPPD, LKJP, SOP, RENSTRA	5 Dokumen	7 Dokumen	
	Jumlah eksampler per dokumen			45 Eksampler	45 Eksampler	3 Dokumen	3 Dokumen	45 Eksampler	45 Eksampler	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Jumlah desa rumah tangga sasaran			20 Desa	20 Desa	20 Desa		20 Desa	20 Desa	20 Desa	0%	
	Jumlah SKPD			38 SKPD /27 Kecamatan	39 SKPD/27 Kecamatan	66 SKPD	66 SKPD	38 SKPD /27 Kecamatan	39 SKPD/27 Kecamatan	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan SISMON TEPRA berbasis Online			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan					93%	96%			93%	96%	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	5 Dokumen			6 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Informasi yang diupload					20 Berita	25 berita			20 Berita	25 berita	
	Jumlah Pelaksanaan Pameran					1 Kegiatan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	
5	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel			100%	100%	98%	99%	100%	100%	98%	99%	
	Jumlah SP2D yang diterbitkan			7450 SP2D	7450 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	7450 SP2D	7450 SP2D	7450 SP2D	7500 SP2D	
6	Persentasi peningkatan promosi dan kerjasama investasi			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah pelaksanaan pameran			1 Kali	1 Kali			1 Kali	1 Kali			
7	Persentasi pengembangan komunikasi informasi dan media massa			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah berita/informasi yang ditayangkan			20 Berita	20 Berita			18 Berita	19 Berita			
8	Persentase penetaan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			100%	100%			100%	100%			
	Jumlah Lahan yang diSertifikat			72 Sertifikat	20 Sertifikat			72 Sertifikat	20 Sertifikat			
9	Ketepatan Waktu Penetapan APBD			100%	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Presentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua					86.67%	93.74%			86.67%	93.74%	
	Presentase Penyaluran Belanja Daerah					95%	98%			95%	98%	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Presentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah Secara Benar					72.73%	81.82%			72.73%	81.82%	
	Presentase Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Standar Satuan Harga Barang/ RKBMD yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu					100%	100%			100%	100%	
	Presentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan					29.61%	29.78%			29.61%	29.78%	
	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Perda APBD			Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar	2 Dokumen	2 Dokumen	Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar	2 Dokumen	2 Dokumen	
				Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			
	Jumlah DokumenPerda APBD			Ranperkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar	2 Dokumen	2 Dokumen	Perkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar	2 Dokumen	2 Dokumen	
				Perkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar			Perkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar			
	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan			Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			
	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD			Ranperkada 100 Exemplar	Ranperkada 100 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	Ranperkada 100 Exemplar	Ranperkada 100 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	
				Perkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar			Perkada 100 Exemplar	Perkada 100 Exemplar	0%	0%	
	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban			75 Exemplar	75 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	75 Exemplar	75 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban			75 Exemplar	75 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	75 Exemplar	75 Exemplar	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD			Ranperda 80 Exemplar dan Perda 80 Exemplar	-			Ranperda 80 Exemplar dan Perda 80 Exemplar				
	Tersedinya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah			1 Paket	1 Paket	1 Software	1 Software	1 Paket	1 Paket	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi			75 Orang	75 Orang	8 Kegiatan	9 Kegiatan	75 Orang	75 Orang	8 Kegiatan	9 Kegiatan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah			1 Paket	1 Paket	3 Laporan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Laporan	2 Paket	
	Jumlah DPA dan DPPA SKPD			33 SKPD & 27 Kecamatan	39 SKPD/27 Kecamatan	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	33 SKPD & 27 Kecamatan	39 SKPD/27 Kecamatan	132 DPA/DPPA	132 DPA/DPPA	
	Jumlah pelaksanaan penyusunan akuntansi			1 Paket								
	Daftar Aset yang dimiliki			1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah SKPD yang dinilai			66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD			80 Eksampler Nota Keuangan	80 Eksampler Nota Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	80 Eksampler Nota Keuangan	80 Eksampler Nota Keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	
				80 Eksampler PPAS	80 Eksampler PPAS			80 Eksampler PPAS	80 Eksampler PPAS			
	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA			1 Paket	1 Paket	1 Software	1 Software	1 Paket	1 Paket	1 Software	1 Software	
	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset			1 Paket	1 Paket	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Paket	1 Paket	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
	Pendataan Aset milik daerah			1 Paket								
	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa			1 Paket	1 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Paket	1 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
	Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan			70 Orang /2 Angkatan	70 Orang /2 Angkatan	70 Peserta /2 Angkatan	70 Peserta /2 Angkatan	70 Orang /2 Angkatan	70 Orang /2 Angkatan	70 Peserta /2 Angkatan	70 Peserta /2 Angkatan	
	Jumlah faktur pajak			815 Faktur Pajak	815 Faktur Pajak	820 Faktur Pajak	820 Faktur Pajak	814 Faktur Pajak	815 Faktur Pajak	820 Faktur Pajak	820 Faktur Pajak	
	Jumlah exsamplar Perda			Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar			Ranperda 100 Exemplar	Ranperda 100 Exemplar			
				Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			Perda 100 Exemplar	Perda 100 Exemplar			
	Jumlah exsamplar Perda			100 Exemplar	100 Exemplar			100 Exemplar	100 Exemplar			
	Jumlah examplar Perda BMD			80 Exemplar	80 Exemplar			80 Exemplar				
	Pengelolaan,Pemeliharaan dan pengembangan sistem penyusunan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran secara online			1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan			1 Paket	1 Paket	12 Kali	12 Kali	1 Paket	1 Paket	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah			1 Paket	1 Paket	12 Laporan	12 Laporan	1 Paket	1 Paket	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah			1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	1 Paket	1 Paket	66 SKPD	66 SKPD	
	Jumlah Laporan PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD			65 Exemplar	65 Exemplar	792 Laporan	792 Laporan	65 Exemplar	65 Exemplar	792 Laporan	792 Laporan	
	Jumlah laporan aset			25 Laporan	25 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
	Jumlah SPM yang terbit			7000 spm	7000 spm	7000 SPM	7000 SPM	7000 spm	7000 spm	7000 SPM	7000 SPM	
10	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara			100%	100%	96%	97%	95%	95%	96%	97%	
	Jumlah kasus TGR			5 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Isu strategis atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Optimalisasi manajemen Aset Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual*;
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan barang milik daerah (E-Planning, E-Budgeting, dan SimBMD);
4. Penerapan Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pengelolaan Kas Daerah yang berhadapan dengan percepatan realisasi APBD dan tertib administrasi;
5. Optimalisasi dan modernisasi pelayanan berbasis mutu, melalui Inovasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Belum optimalnya fungsi perencanaan dan distribusi dalam penyusunan APBD.
2. Belum optimalnya pengelolaan belanja daerah
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.
4. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusi Aparatur lingkup BPKAD

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan berbasis online (e-budgeting);

2. Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai standar akuntansi (SAP) yang berbasis akrual;
3. Peningkatan validasi pengelolaan data asset;
4. Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pengelolaan keuangan;
5. Peningkatan kualitas manajemen kinerja BPKAD secara berkelanjutan;
6. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan;
7. Terciptanya *Reward* dan *Punishment* yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
8. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan/kinerja;
9. Peningkatan kualitas layanan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kec. T Riattang Barat	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	97%	25,277,984,850	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kec. T Riattang Barat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	97%	28,573,840,950	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. T Riattang Barat	Jumlah per jenis rekening	294 Rekening Listrik 20 Rekening Air 47 Rekening Telpon/Speede	21,346,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Rekening yang di Bayar	294 Rekening Listrik 20 Rekening Air 47 Rekening Telpon/Speede	24,829,973,650	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	108 ASN	779,346,948	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	109 ASN	791,346,948	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 Media	262,467,902	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	52 Media	262,467,902	
	Pengelolaan Gaji	Kec. T Riattang Barat	Jumlah PNS yang menerima Gaji	9.372 PNS	314,155,000						
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	1000 SPPD	700,000,000	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SPPD	1000 SPPD	700,000,000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T Riattang Barat	JenisKebutuhan Administrasi Perkantoran	8 Jenis	1,875,815,000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	8 Paket	1,990,052,450	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kec. T Riattang Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik	98%	2,150,100,000	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kec. T Riattang Barat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik	98%	3,223,580,300	
	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah bangunan gedung kantor	1 Gedung	1,000,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah bangunan gedung kantor	1 Gedung	2,000,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Motor 4 Unit	75,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Motor 3Unit	60,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	jumlah perlengkapan rumah dinas	1 Set	70,000,000	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	Jumlah perlengkapan rumah dinas	2 Unit	24,000,000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlan dan jenis perlengkapan gedung kantor	5 Unit	80,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlan dan jenis perlengkapan gedung kantor	5 Unit	30,750,000	
	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	Jumlah dan jenis peralatan rumah dinas	1 Set	20,000,000	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	Jumlah dan jenis peralatan rumah dinas	2 Unit	10,000,000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peralatan gedung kantor	15 Unit	143,500,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peralatan gedung kantor	26 Unit	336,230,300	
	Pengadaan Mebeleur	Kec. T Riattang Barat	jumlah kebutuhan mebeleur	1 Unit	40,000,000	Pengadaan Mebeleur	Kec. T Riattang Barat	jumlah kebutuhan mebeleur	7 Unit	31,000,000	
	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabtan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 Ruangan	30,000,000	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabtan/Dinas	Kec. T Riattang Barat	jumlah pemeliharaan rumah dinas	1 Ruangan	30,000,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 Ruangan	155,500,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	7 Paket	155,500,000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	37 unit	315,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Mobil dan Motor yang dipelihara	42 Unit	325,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	35 Unit	221,100,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	35 Unit	221,100,000	
						PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kec. T Riattang Barat	Persentase Kehadiran ASN	100%	30,000,000	Program Baru
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Baju Batik	110 Buah	30,000,000	Kegiatan Baru
3	PENATAAN PENGUASAAN , PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Kec. T Riattang Barat	Persentase Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	218,704,500						Program di hapus
	Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah lahan yang disertifikatkan	15 Sertifikat	218,704,500						Kegiatan dihapus
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kec. T Riattang Barat	Meningkatnya ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	93%	294,750,000	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kec. T Riattang Barat	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik	100%	355,000,000	
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim	2 ASN	65,000,000	Kegiatan Baru
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	15 Orang	40,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	8 ASN	40,000,000	
	Sosialisasi Pajak	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peserta sosialisasi	75 Orang	54,750,000	Sosialisasi Pajak	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak	75 Peserta	50,000,000	
						Pengembangan Kompetensi dan	Kec. T Riattang	Jumlah Peserta StudiBanding	50 ASN	200,000,000	Kegiatan Baru

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Pembelajaran Aparatur	Barat				
	Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peserta studi banding	60 Orang	200,000,000						Kegiatan dihapus
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kec. T Riattang Barat	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	93%	617,107,550	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kec. T Riattang Barat	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu	100%	399,179,300	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T Riattang Barat	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja PD	LKJIP,LPPD,LKJ P,SOP,LK	89,965,050	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. T Riattang Barat	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP,LPPD,LKJ P,SOP,LK	88,095,050	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Eksampler per dokumen	45 Eksampler	44,280,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Laporan Realisasi Semester	3 Dokumen	44,280,000	
	Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi	Kec. Sibulue	Jumlah desa rumah tangga sasaran	20 Desa	56,000,000	Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi	Kec. Sibulue	Jumlah desa rumah tangga sasaran	20 Desa	51,000,000	
	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Laporan SISMON TEPPRA berbasis Online	66 SKPD	77,462,500	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SKPD yang Verifikasi	66 SKPD	95,000,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SKPD	66 SKPD	349,400,000	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Laporan SISMONTEPPRA dan Laporan SPIP	12 Laporan	120,804,250	
6	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,INFO RMASI DAN MEDIA MASSA	Kec. T Riattang Barat	Persentasi pengembangan komunikasi informasi dan media massa	100%	39,314,000						
	Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kec. T Riattang Barat	Jumlah berita/informasi yang ditayangkan	25 Berita	39,314,000						

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. T Riattang Barat	Persentase peningkatan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan	99%	262,880,000	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. T Riattang Barat	Presentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit	98%	275,880,100	
	Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SP2D yang diterbitkan	7450 SP2D	262,880,000	Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SP2D yang diterbitkan	7450 SP2D	275,880,100	
						PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	Kec. T Riattang Barat	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu	100%	170,000,000	
						Penyusun Rencana Perangkat Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70,000,000	
						Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Informasi yang diupload	20 Berita	25,000,000	
						Promosi dan Pameran Pembangunan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kegiatan	75,000,000	
8	PENINGKATAN PROMOSI KERJASAMA DAN INVESTASI	Kec. T Riattang Barat	Persentasi peningkatan promosi dan kerjasama investasi	100%	75,000,000						Program di hapus
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pelaksanaan pameran	1 kegiatan	75,000,000						Kegiatan dihapus
9	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. T Riattang Barat	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100%	5,666,574,100	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kec. T Riattang Barat	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan	Tepat Waktu	5,790,019,350	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD	36.98%		
								Persentase Belanja tidak Langsung terhadap total APBD	63.02%		
								Persentase Belanja Modal terhadap total APBD	15%		
								Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD	30%		
								Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD	21.74%		
								Persentase SILPA terhadap total APBD	3.15%		
								Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua	90.13%		
								Persentase Penyaluran Belanja Daerah	96.85%		
								Presentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD Secara Benar	77.27%		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan	29.69%		
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Buku standar harga	2 Dokumen	125,102,500	Penyusunan Standar Satuan Harga	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	2 Dokumen	125,102,500	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah exemplar Perda APBD	1 Dokumen	183,525,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD	2 Dokumen	332,575,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah exemplar Perbup APBD	1 Dokumen	169,187,100	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD	2 Dokumen	286,857,100	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah exemplar Perda APBD Perubahan	1 Dokumen	208,250,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD Perubahan	1 Dokumen	208,250,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah exemplar Perbup Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen	198,762,500	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran perubahan	1 Dokumen	198,762,500	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawabannya	1 Dokumen	230,570,000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD Pertanggungjawaban	1 Dokumen	230,570,000	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	1 Dokumen	174,816,000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	1 Dokumen	174,816,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Terpeliharanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	1 Software	234,634,000	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Software	234,634,000	
	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Kegiatan sosialisasi	8 kegiatan	338,321,750	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	8 kegiatan	338,321,750	
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Kec. T Riattang Barat	Identifikasi aset bernilai	2 Kegiatan	444,781,500	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	3 Laporan	286,381,500	
	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	39 SKPD/27 Kecamatan	300,226,000	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	132 DPA/DPPA	274,086,000	
	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T Riattang Barat	Daftar aset yang dimiliki	1 Dokumen	165,634,500	Pengamanan Aset Daerah	Kec. T Riattang Barat	Daftar aset yang dimiliki	66 SKPD	165,634,500	
	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	2 Dokumen	111,072,500	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen PPAS dan NOTA Keuangan APBD	2 Dokumen	111,072,500	
	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T Riattang Barat	Pemeliharaan SIMDA-BMD	1 Software	95,430,000	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA	Kec. T Riattang Barat	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	1 Software	95,430,000	
	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Aset	1 Kegiatan	125,716,000	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset	2 Kegiatan	125,716,000	
	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T Riattang Barat	Daftar kebutuhan dan pemeliharaan Barang/Jasa	2 Dokumen	90,345,000	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec. T Riattang Barat	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	2 Dokumen	71,445,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peserta Bimtek	70 Orang /2 Angkatan	87,210,000	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah peserta Bimtek	70 ASN	73,460,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Faktur Pajak	820 faktur pajak	101,572,750	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Faktur Pajak	820 faktur pajak	101,572,750	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda	1 Dokumen	124,050,000						Kegiatan di hapus
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Perda	1 Dokumen	128,270,000						Kegiatan di hapus
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T Riattang Barat	Penilaian Barang Milik Daerah	66 SKPD	134,989,000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SKPD yang diNilai	66 SKPD	117,889,000	
	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Pemeliharaan Aplikasi	1 Software	405,390,000	Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran	66 SKPD	405,390,000	
	Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan	12 Kali	51,800,000	Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	12 Kali	51,800,000	
	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SPM yang terbit	7000 SPM	306,072,750	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Membayar	Kec. T Riattang Barat	Jumlah SPM yang terbit	7000 SPM	277,475,750	
	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah	Kec. T Riattang Barat	Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	392,927,250	Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	12 Laporan	269,000,000	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	66 SKPD	369,954,000	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	66 SKPD	371,034,000	
	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	225,725,000	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD	1 Dokumen	196,645,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelaporan Aset	Kec. T Riattang Barat	Jumlah laporan aset Daerah	2 Laporan	142,239,000	Pelaporan Aset	Kec. T Riattang Barat	Jumlah laporan aset Daerah	2 Laporan	133,239,000	
						Penataan,Penguasaan,P emilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	15 HGB	218,704,500	Kegiatan Baru
						Pengelolaan Gaji	Kec. T Riattang Barat	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	9372 ASN	314,155,000	Kegiatan Baru
10	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Kec. T Riattang Barat	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara	96%	182,500,000	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Kec. T Riattang Barat	Persentase tindak lanjut temuan atas kerugian negara yang diselesaikan melalui sidang TP- TGR	96%	182,500,000	
	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Kasus TGR	10 Kasus	182,500,000	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Kec. T Riattang Barat	Jumlah Kasus TGR	10 Kasus	182,500,000	
11	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kec. T Riattang Barat	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	70,000,000						Program di hapus
	Penyusunan Rancangan Perangkat Daerah	Kec. T Riattang Barat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	70,000,000						Kegiatan di hapus
J U M L A H					34,854,915,000					39,000,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 89 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2018 tidak melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi untuk hibah bansos, BPKAD mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi di OPD yang sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI

Adapun Visi Kementerian Dalam Negeri RI adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Berdasarkan Visi tersebut Kemendagri merumuskan tujuan yaitu diantaranya *"Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah"*, dengan sasaran strategis meningkatkannya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kemendagri RI tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemendagri RI telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategis sebagai berikut:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota secara tepat waktu;

2. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi /Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
3. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
4. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah
5. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
6. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
7. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;

Mengkaji visi dan misi Kementerian Dalam Negeri RI memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong penetapan Perda tentang APBD dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bone secara tepat waktu;
2. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja pada pelayanan masyarakat, terutama bidang infrastruktur 5%, bidang kesehatan 10%, dan bidang pendidikan 20%; dan
4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kemampuan fiskal daerah.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kabupaten Bone untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Telaah Renstra Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan Kementerian Keuangan RI yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah, melalui strategi:

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas;
- b. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka Perencanaan anggaran yang berkualitas adalah:

- 1) Pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga;
- 2) Pencanangan program penghematan dengan pengurangan frekuensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, pembatasan pembelian kendaraan dan pembangunan gedung baru, pengurangan aktivitas seremonial, dan pengutamaan konsumsi atau penggunaan produk dalam negeri (quick wins);
- 3) Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal;
- 4) Penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- 5) Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat mandatory spending seperti anggaran pendidikan, penyediaan dana desa dan lainnya;
- 6) Memprioritaskan alokasi belanja untuk mendanai isu strategis jangka menengah yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan alutsista TNI, ketahanan pangan dan energy;
- 7) Peningkatan sinergi dan kapasitas stakeholders penganggaran.

Strategi yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan adalah;

- 1) Percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi- fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap danadekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien;
- 3) Mengembangkan system transfer yang meminimumkan ketimpangan horizontal dan vertikal serta memperbaiki kualitas pelayanan;
- 4) Mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah agar belanja daerah menjadi efektif dan efisien;
- 5) Memperluas akses daerah terhadap sumber pembiayaan pinjaman dan diminati oleh daerah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penyediaan pelayanan publik;
- 6) Menyusun pemeringkatan daerah sebagai bentuk penilaian kinerja keuangan daerah yang terintegrasi dengan mekanisme pemberian insentif;
- 7) Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dana transfer yang bersifat spesifik;
- 8) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dasar.

Telaah Renstra Badan Pemeriksa Keuangan RI

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yakni sebagai berikut:

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui strategi:

Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli.

Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu:

- a. Komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa;
- b. Komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang sudah diberikan, BPK akan meningkatkan kualitas dari proses pemberian Pendapat BPK sebagai wujud relevansi pemeriksaan dengan isu-isu yang berkembang dalam masyarakat yang merefleksikan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Renstra Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada

Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah *"Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib, Taat Aturan, Transparan dan Akuntabel"*. Berdasarkan Tujuan tersebut BPKD Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sasaran yaitu *"Optimalisasi Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah"*.

Telaahan Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dapat dijabarkan Arah dan Kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone yakni sebagai berikut:

Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di 24 kabupaten/kota melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan adalah:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik di 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan
2. Mendorong terwujudnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui evaluasi, monitoring dan bimbingan yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- | | |
|-----------|---|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih |
| Indikator | : 1. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD
2. Predikat SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB
3. Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat |
| Sasaran 1 | : Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi |
| Indikator | : 1. Opini BPK RI berdasarkan hasil Audite terhadap LKPD |
| Sasaran 2 | : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah. |
| Indikator | : 1. Predikat SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/Kemenpan RB
2. Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat |

Tabel. 3.2
Matrix Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih	Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bersih, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Opini BPK-RI berdasarkan hasil audite terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan APBD P sesuai Ketentuan
					Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD
					Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap total APBD
					Persentase Belanja Modal terhadap total APBD
					Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD
					Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD
					Persentase penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua
		Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja BPKAD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat SAKIP BPKAD atas hasil evaluasi Inspektorat/ Kemenpan RB	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase SILPA terhadap total APBD
					Persentase penyaluran belanja Daerah
					Persentase penyajian Laporan Barang Milik daerah OPD secara benar
					Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat hak guna bangunan
					Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan
					Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
				Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang kondisi baik
				Peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai
				Penigkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik
				Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian laporan kinerja dan keuangan yang ditetapkan tepat waktu
				Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu
		Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat		Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kabupaten Bone. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dengan memerhatikan ketersediaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKPD sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah. Pemerintahan provinsi /Kabupaten /Kota agar menjadikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah dengan tetap memerhatikan RPJMD.
2. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memberi sanksi kepada pejabat yang melakukan tindakan melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan sendiri.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis AkruaI melalui penataan kelembagaan ,serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan system akuntansi pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah;
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan pada upaya –upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK RI;
5. Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) agar memerhatikan petunjuk teknis kementerian /lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan perlu dipertimbangkan terkait dana pendamping yang dipersyaratkan agar sudah diperhitungkan dalam pagu indikatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang koordianasi penyusunan petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus;
6. Dukungan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kebijakan investasi pemerintahan daerah permanen dan nonpermanen agar dapat mengurangi resiko kegagalan investasi daerah sesuai dengan Peraturan pemerintahan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintahan Daerah;
7. Mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten /kota ke provinsi dan kepusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik khususnya Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Bone dalam menyusun program dan kegiatan bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 4) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 5) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pembangunan gedung Kantor
- 2) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 3) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 4) Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 5) Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
- 6) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 7) Pengadaan Mebelur
- 8) Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur
- 4) Sosialisasi Pajak

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi
- 4) Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban
- 5) Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran

6. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD

7. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- 1) Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- 2) Pengelolaan Website Perangkat Daerah
- 3) Promosi dan Pameran Pembangunan

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Penyusunan Standar Satuan Harga
- 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

- 5) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 7) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - 8) Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - 9) Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 10) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.
 - 11) Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD
 - 12) Pengamanan aset daerah
 - 13) Penyusunan Prioritas dan flafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD
 - 14) Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA-BMD
 - 15) Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah
 - 16) Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa
 - 17) Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 18) Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah
 - 19) Penilaian Barang Milik Daerah
 - 20) Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 21) Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan
 - 22) Pengelolaan sistem dan verifikasi surat perintah menbayar
 - 23) Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah
 - 24) Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - 25) Pelaporan Aset
 - 26) Pengelolaan Gaji
 - 27) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan
- 9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
- 1) Peningkatan Pelaksanaan TGR

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2019 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 72.367.710.000,00,- terdiri dari:

- 1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp.33.367.710.044,00 dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- 2. Belanja Langsung sebesar Rp.39.000.000.000,00.

Tabel.4.1
Rencana Belanja BPKAD Tahun 2019

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	33.367.710.044.00	46.11
2	Belanja Langsusng	39.000.000.000.00	53.89
	JUMLAH	72.367.710.000.00	100.00

Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		97%	28,286,340,950			98%	28,852,067,769
1 20 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah Rekening yang di Bayar	Kec.T. Riattang Barat	294 Rekening Listrik	24,542,473,650	DAU		294 Rekening Listrik	25,033,323,123
				20 Rekening Air				20 Rekening Air	
				47 Rekening Telpon/ Speede				47 Rekening Telpon/ Speede	
1 20 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ASN yang menerima tunjangan	Kec.T. Riattang Barat	109 ASN	791,346,948	DAU		107 ASN	807,173,887
1 20 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Media yang Menyediakan Bahan Bacaan	Kec.T. Riattang Barat	100 Media	262,467,902	DAU		100 Media	267,717,260
1 20 01 23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah SPPD	Kec.T. Riattang Barat	1000 SPPD	700,000,000	DAU		1100 SPPD	714,000,000
1 20 01 24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Kec.T. Riattang Barat	8 Paket	1,990,052,450	DAU		8 Paket	2,029,853,499
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang kondisi baik		98%	3,543,580,300			99%	881,022,000
1 20 02 03	Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	Kec.T. Riattang Barat	1 Gedung	2,000,000,000	DAU			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kec.T. Riattang Barat	3 Unit Motor	80,000,000	DAU		2 Unit Motor	40,000,000
1 20 02 06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas	Kec.T. Riattang Barat	2 Unit	24,000,000	DAU			
1 20 02 07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Kec.T. Riattang Barat	AC 3 Unit	30,750,000	DAU			
1 20 02 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabtan Dinas	Kec.T. Riattang Barat	2 Unit	10,000,000	DAU			
1 20 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kec.T. Riattang Barat	Komputer/Pc /Lectop 13 Unit	336,230,300	DAU		Komputer/Pc 10 Unit	110,500,000
				Mesin Ketik 1 Unit				Mesin Ketik 1 Unit	
				Mesin Absensi 1 Uni				Mesin Absensi 1 Uni	
				Printer 5 Unit				Printer 6 Unit	
				UPS 3 Unit					
				Kulkas 2 Unit					
				Kamera 1 Unit					
				Proyektor 1 Unit					
				GPS Pengukur Tanah 1 Unit					
1 20 02 10	Pengadaan Mebelur	Jumlah Kebutuhan Mebelur	Kec.T. Riattang Barat	7 Unit	331,000,000	DAU		Almari 20 Unit	50,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 02 20	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabtan	Jumlah Pemeliharaan Rumah Jabatan	Kec.T. Riattang Barat	1 Paket	30,000,000	DAU			
1 20 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kec.T. Riattang Barat	4 Paket	155,500,000	DAU		3 Paket	105,000,000
1 20 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Mobil dan Motor yang di Pelihara	Kec.T. Riattang Barat	Mobil 7 Unit	325,000,000	DAU		Mobil 10 Unit	350,000,000
				33 Motor Dinas		DAU		35 Motor Dinas	
1 20 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan yang di Pelihara Gedung Kantor	Kec.T. Riattang Barat	40 Unit	221,100,000	DAU		40 Unit	225,522,000
1 20 05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran ASN		100%	30,000,000			100%	30,600,000
1 20 05 03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah baju seragam	Kec.T. Riattang Barat	110 Set	30,000,000	DAU		110 Set	30,600,000
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memahami tata Kelola Pemerintahan, Keuangan dan Aset dengan baik		100%	322,500,000			100%	364,000,000
1 20 05 02	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Pim	Kec.T. Riattang Barat	1 ASN	32,500,000	DAU		2 ASN	65,000,000
1 20 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Kec.T. Riattang Barat	12 ASN	40,000,000	DAU		12 ASN	44,000,000
1 20 05 32	Pengembangan Kompetensi dan Pembelajaran Aparatur	Jumlah Peserta StudiBanding	Luar Provinsi	50 ASN	200,000,000	DAU		50 ASN	204,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 05 26	Sosialisasi Pajak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak	Kec.T. Riattang Barat	75 Peserta	50,000,000	DAU		75 Peserta	51,000,000
1 20 06	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan tepat waktu		100%	399,179,300			100%	365,588,265
1 20 06 01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Kec.T. Riattang Barat	5 Dokumen	88,095,050	DAU		7 Dokumen	92,499,802.50
1 20 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Eksampler per Dokumen	Kec.T. Riattang Barat	3 Dokumen	44,280,000	DAU		3 Dokumen	46,494,000.00
1 20 06 05	Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi	Jumlah Desa RTS	Kec.T. Riattang Barat	20 Desa	51,000,000	DAU			
1 20 06 12	Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggung Jawaban	Jumlah SKPD yang melakukan Verifikasi SPJ	Kec.T. Riattang Barat	66 SKPD	95,000,000	DAU		66 SKPD	99,750,000.00
1 20 06 14	Monitoring Evaluasi Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan SISMON Tepa Bebasis Online SKPD	Kec.T. Riattang Barat	12 Laporan	120,804,250	DAU		12 Laporan	126,844,462.50
1 20 08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu		100%	170,000,000			100%	173,400,000
1 20 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.T. Riattang Barat	6 Dokumen	70,000,000	DAU		5 Dokumen	71,400,000

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 08 02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Informasi yang diupload	Kec.T. Riattang Barat	20 Berita	25,000,000	DAU		25 berita	25,500,000
1 20 08 03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	Kec.T. Riattang Barat	1 Kegiatan	75,000,000	DAU		1 Kegiatan	76,500,000
1 20 07	Program Penigkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase SP2D yang Terbit Kurang 2 (dua) Hari terhadap SP2D yang Terbit		98%	275,880,100			99%	289,674,105
1 20 07 03	Peningkatan pelaksanaan dana kas daerah oleh BUD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Kec.T. Riattang Barat	7450 SP2D	275,880,100	DAU		7500 SP2D	289,674,105.00
1 20 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan		Tepat Waktu	5,790,019,350			Tepat Waktu	5,905,819,737
		Persentase Belanja Langsung terhadap total APBD		36.98%				37.80%	
		Persentase Belanja tidak Langsung terhadap total APBD		63.02%				62.20%	
		Persentase Belanja Modal terhadap total APBD		30%				30%	
		Persentase Belanja Kesehatan terhadap total APBD		15.61%				15.68%	
		Persentase Belanja Pendidikan terhadap total APBD		21.74%				21.85%	

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase SILPA terhadap total APBD		3.15%				2.76%	
		Persentase Penyajian LK SKPD sesuai SAP berbasis Akrua		90.13%				93.74%	
		Persentase Penyaluran Belanja Daerah		96.85%				97.24%	
		Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah OPD secara benar		77.27%				81.82%	
		Persentase Bidang Lahan Aset Daerah yang Bersertifikat Hak Guna Bangunan		29.69%				29.78%	
1 20 17 02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga Satuan Barang	Kec.T. Riattang Barat	2 Dokumen	125,102,500	DAU		2 Dokumen	127,604,550
1 20 17 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Perda APBD	Kec.T. Riattang Barat	2 Dokumen	332,575,000	DAU		2 Dokumen	339,226,500
1 20 17 07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD	Kec.T. Riattang Barat	2 Dokumen	286,857,100	DAU		2 Dokumen	292,594,242
1 20 17 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD Perubahan	Kec.T. Riattang Barat	1 Dokumen	208,250,000	DAU		1 Dokumen	212,415,000
1 20 17 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD Penjabaran perubahan	Kec.T. Riattang Barat	1 Dokumen	198,762,500	DAU		1 Dokumen	202,737,750

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 17 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda APBD Pertanggungjawaban	Kec.T. Riattang Barat	1 Dokumen	230,570,000	DAU		1 Dokumen	235,181,400
1 20 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Perda APBD Penjabaran Pertanggungjawaban	Kec.T. Riattang Barat	1 Dokumen	174,816,000	DAU		1 Dokumen	178,312,320
1 20 17 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Keuangan Daerah	Kec.T. Riattang Barat	1 Software	234,634,000	DAU		1 Software	239,326,680
1 20 17 14	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	Kec.T. Riattang Barat	8 Kegiatan	338,321,750	DAU		9 Kegiatan	345,088,185
1 20 17 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Aset Daerah	Kec.T. Riattang Barat	3 Laporan	286,381,500	DAU		3 Laporan	292,109,130
1 20 17 20	Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD	Jumlah DPA dan DPPA SKPD	Kec.T. Riattang Barat	132 DPA/DPPA	274,086,000	DAU		132 DPA/DPPA	279,567,720
1 20 17 28	Pengamanan aset daerah	Daftar Aset yang dimiliki	Kec.T. Riattang Barat	66 SKPD	165,634,500	DAU		66 SKPD	168,947,190
1 20 17 32	Penyusunan Prioritas dan flafon Anggaran Sementara dan Nota Keuangan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan PPAS APBD dan Rancangan Nota Keuangan APBD	Kec.T. Riattang Barat	2 Dokumen	111,072,500	DAU		2 Dokumen	113,293,950
1 20 17 34	Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA-BMD	Terlaksananya Monev aplikasi SIMDA	Kec.T. Riattang Barat	1 Software	95,430,000	DAU		1 Software	97,338,600
1 20 17 35	Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penghapusan Asset	Kec.T. Riattang Barat	2 Kegiatan	125,716,000	DAU		2 Kegiatan	128,230,320

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20 17 41	Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/jasa	Tersedianya Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa	Kec.T. Riattang Barat	2 Dokumen	71,445,000	DAU		2 Dokumen	72,873,900
1 20 17 42	Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta Bimtek/Angkatan	Kec.T. Riattang Barat	70 ASN	73,460,000	DAU		70 ASN	74,929,200
1 20 17 43	Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Faktur Pajak	Kec.T. Riattang Barat	820 Faktur	101,572,750	DAU		820 Faktur	103,604,205
1 20 17 47	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang diNilai	Kec.T. Riattang Barat	1 Laporan	117,889,000	DAU		1 Laporan	120,246,780
1 20 17 50	Penigkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dibina dalam penggunaan aplikasi penganggaran	Kec.T. Riattang Barat	66 SKPD	405,390,000	DAU		66 SKPD	413,497,800
1 20 17 52	Pengelolaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Jumlah pelaksanaan Administrasi Data Kearsipan Keuangan	Kec.T. Riattang Barat	12 Kali	51,800,000	DAU		12 Kali	52,836,000
1 20 17 64	Pengelolaan sistem dan vertifikasi surat perintah membayar	Jumlah SPM yang diterbitkan	Kec.T. Riattang Barat	7000 SPM	277,475,750	DAU		7000 SPM	283,025,265
1 20 17 65	Peningkatan Pelaporan Adminstrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	Kec.T. Riattang Barat	12 Laporan	269,000,000	DAU		12 Laporan	274,380,000
1 20 17 66	Peningkatan Manajemen Pengelolaan keuangan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Keuangan	Kec.T. Riattang Barat	66 SKPD	371,034,000	DAU		66 SKPD	378,454,680
1 20 17 67	Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Jumlah Eksampler Laporan	Kec.T. Riattang	792 Laporan	196,645,000	DAU		792 Laporan	200,577,900

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat. Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	APBD	PertanggungJawaban Pelaksanaa APBD	Barat						
1 20 17 68	Pelaporan Aset	Jumlah Laporan Aset	Kec.T. Riattang Barat	2 Laporan	133,239,000	DAU		2 Laporan	135,903,780
1 20 17 86	Pengelolaan Gaji	Jumlah PNS yang Menerima Gaji	Kec.T. Riattang Barat	9372 PNS	314,155,000	DAU		9372 PNS	320,438,100
1 20 17 85	Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Bangunan	Jumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan	Kec.T. Riattang Barat	15 HGB	218,704,500	DAU		15 HGB	223,078,590
1 20 17 86	Penyusunan Ramperda dan Ranperkada terkait pengelolaan keuangan	Jumlah Perda dan Perkada	Kec.T. Riattang Barat			DAU			
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentae Pengembalian atas Kerugian Negara		96%	182,500,000			97%	186,150,000
1 20 20 09	Peningkatan Pelaksanaan TGR	Jumlah Kasus TGR	Kec.T. Riattang Barat	10 Kasus	182,500,000	DAU		12 Kasus	186,150,000
					39,000,000,000				37,048,321,876

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BPKAD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja BPKAD tahun 2019 merupakan menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah tahun awal RPJMD dan Renstra BPKAD tahun 2018-2023 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja BPKAD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Watampone, 1 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE


Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19650915 198603 1 018